

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ARINI ULFA MAWADDATY
NIM. 135010100111148**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA
KEPAILITAN (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang)**

Oleh:

**Arini Ulfa Mawaddaty
135010100111148**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis,

Dr. Abdul Rachmad Budiono SH., MH.
NIP. 195911181986011002

Ratih Dheviana Puru HT, SH.,LLM.
NIP. 197907282005022001

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dr. Reka Dewantara, SH., MH.
NIP. 198305022008121003

Ranitya Ganindha, SH.,MH.
NIP. 198806302014042001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 197206222005011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,MSi
NIP. 196208051988021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 5 Mei 2017
Yang menyatakan,



Arini Ulfa Mawaddaty
135010100111148



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Terima kasih yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
3. Bapak Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
4. Bapak Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
5. Drs. Widaldi, Ayahanda penulis dan Dra. Anisah Hasyim, Ibunda penulis, orang tua yang mengantarkan penulis dengan pengorbanan yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan yang tidak dapat dibalas oleh penulis;
6. Noufal Rizqi Nur Rohman, kakak yang tidak pernah berhenti membantu, menolong dan menyemangati;
7. Vega Bintang Widyanto, terimakasih atas pengorbanan, semangat, dan masih banyak lagi yang lainnya selama ikut bersama penulis merasakan proses menyelesaikan Skripsi ini;
8. Teman-teman yang sedari Maba setia menemani suka dan duka perkuliahan (Fitriyana, Intan, Koyin, Faisal, Yudha, Sabrina) yang sama sekali tidak pernah meninggalkan;
9. Segenap keluarga Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH UB), khususnya BANGSAL 13;
10. Teman-teman KKN Kelompok 5 yang tidak pernah berhenti menyemangati, terutama untuk 11 perempuan yang selalu ada;
11. Seluruh teman, sahabat dan saudara penulis yang tidak disebutkan diatas penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 5 Mei 2017

Penulis



RINGKASAN

Arini Ulfa Mawaddaty, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017. ANALISI YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI NORMATIF PASAL 1- AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG) Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn.

Pada skripsi ini penulis meneliti terkait sita jaminan sebagai perlindungan hukum bagi kreditor dalam perkara kepailitan berdasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terdapat kekaburan hukum atau ketidakjelasan pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu mengenai batasan ukuran perlindungan hukum bagi kreditor sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan dan makna yang dianggap wajar Pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: (1) Bagaimana ukuran menentukan perlindungan hukum bagi kreditor yang digunakan sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan? (2) Bagaimana makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan terkait perlindungan hukum bagi kreditor? Metode penelitian ini memakai metode penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menggunakan teknik analisis kualitatif serta kemudia dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis.

Hasil Penelitian mengenai perlindungan hukum kreditor terkait sita jaminan dalam perkara kepailitan yaitu: (1) Batasan terhadap kalimat perlindungan hukum bagi kreditor terkait sita jaminan dalam perkara kepailitan adalah secara ekspesional. Hal mana berarti jika terdapat permohonan dari Kreditor untuk melakukan sita jaminan maka seluruhnya merupakan kewenangan dari Hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusannya dengan melihat tujuan utama dari adanya sita jaminan yaitu: sita jaminan berfungsi untuk melindungi kreditor dari itikad buruk dari debitor sehingga permohonan pailit tidak hampa apabila nanti pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sita jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditor terhadap kepastian atas objek eksekusi bila putusan pernyataan pailit telah berkekuatan hukum tetap. (2) Makna jaminan yang dianggap wajar sendiri yakni bahwa jaminan tersebut harus sesuai atau sebagaimana mestinya yang harus diberikan oleh kreditor sebagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pihak kreditor maupun pihak debitor. Penetapan agar kreditor memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan ini dimaksudkan antara lain: a).Pengadilan dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar apabila upaya pengamann tersebut dapat dikabulkan. b).Menjaga keseimbangan anatara kepentingan kedua pihak yaitu kepentingan debitor dan kreditor. c).Dalam menetapkan persyaratan mengenai jaminan tersebut, Pengadilan antara lain sudah semestinya mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dengan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang mungkin diderita oleh debitor apabila pemohon pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

SUMMARY

Arini Ulfa Mawaddaty, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, Mei 2017. JURIDICAL ANALYSIS RELATED TO CONFISCATION OF GUARANTEE IN CASE OF BANKRUPTCY (NORMATIC STUDY IN ARTICLE 1 VERSE (2) AND VERSE (3) OF CONSTITUTION NUMBER 37 YEAR 2004 ABOUT BANKRUPTCY AND LOAN PAYMENT OBLIGATION DELAY) Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

In this thesis, author do research in collateral consfication as a legal protection for creditor in case of bankruptcy based on Constitution Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Loan Payment Obligation Delay. There is a legal ambiguity or vagueness in verse (2) and (3) that is about the size limitations of the legal protection granted to the creditors as a reference or to refuse confiscation and meaning which the Court consider appropriate.

The formulation of the problem in this research are: (1) How does the size determine the legal protection for the creditor used as a reference to be granted or the rejection of confiscation? (2) What is the meaning of the guarantee considered fair by the Court regarding the legal protection for creditors?

This method of research uses legal research methods with legislation approach and conceptual approach, which uses qualitative analytical techniques and then analyzed using grammatical interpretation and teleological interpretation.

The results of research on the protection of creditor law related to confiscation of guarantee in case of bankruptcy are: (1) Limitations to the legal protection sentence for creditors related to confiscation of guarantee in case of bankruptcy are expesional. This means that if there is a request from the Creditors to seize the guarantee then it is entirely the authority of the Judge to consider and determine its decision by looking at the main purpose of the confiscation of the seizure such confiscation serves to protect the creditor from bad faith of the debtor so that the petition of bankruptcy is not empty Later on when the verdict of bankruptcy declaration is dropped and has a permanent legal force and the confiscation of the guarantee provides the legal certainty for the creditor against the certainty of the object of execution if the decision of the bankruptcy statement has permanent legal force. (2) The meaning of the guarantee which is considered reasonable is that the guarantee must be appropriate or as it should be given by the creditors as an attempt made by the Court to provide a balance between the interests of the creditors and the debtor. The determination of the creditors to provide a guarantee that is considered fair by the court is intended as: a) .The courts may require that creditors provide a reasonable amount of guarantees if such safeguards can be granted. b). Maintain a balance between the interests of both parties, debtors and creditors. c). In establishing the requirements of such guarantees, the Court should consider the presence or absence of guarantee for the overall wealth of the debtor, the type of debtor wealth and the amount of guarantee that must be provided in comparison with the likelihood of loss that the debtor may suffer if the applicant of the bankruptcy declaration is rejected by Court.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Kepailitan	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan	12
2. Subjek Hukum Kepailitan	14
3. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit	18
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	23
5. Pengurusan Harta Pailit	26
6. Berakhirnya Kepailitan	28
B. Kajian Umum Sita Jaminan	31
1. Pengertian beserta Dasar Hukum Sita Jaminan	31
2. Macam-Macam Sita Jaminan	32
3. Tujuan Sita Jaminan	36
C. Perlindungan Hukum	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
F. Definisi Konseptual	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)	48
1. Sejarah Berlakunya Kepailitan di Indonesia	48
2. Hal Yang Melatarbelakangi Perlunya Sita Jaminan	51
B. Pembatasan Ukuran Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang Digunakan	



sebagai Acuan Dikabulkan atau Ditolaknya Sita Jaminan	57
1. Perlindungan Hukum Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Dijatuhkan	57
2. Batasan Ukuran Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Sebagai Acuan Dikabulkan atau Ditolaknya Sita Jaminan	66
C. Makna Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditor	70
1. Jaminan Dalam Hukum Perdata	70
2. Makna Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditor	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel. 4.1 Perbedaan Macam Sita Jaminan	64
Tabel. 4.2 Perbedaan Macam Jaminan	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia melaju semakin pesat yang mengakibatkan berbagai macam masalah tentang utang piutang di lingkup masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya perkara Kepailitan akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Kata pailit semakin hari semakin sering di dengar belakangan ini. Banyak perusahaan ataupun perorangan yang oleh pengadilan dinyatakan pailit karena tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit juga biasa disebut dengan bangkrut. Kata 'bangkrut' dalam bahasa inggris yaitu *bankrupt* berasal dari Undang-Undang Itali disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa praktek kebangkrutan dilakukan dengan cara menghancurkan bangku atau kursi dari para pedagang yang dengan sengaja melarikan diri secara diam-diam dan membawa harta dari kreditornya.¹

Dalam hukum Islam, kepailitan disebut dengan *At-Taflis*. Secara etimologi, *at-taflis* berarti pailit atau bisa disebut jatuh miskin. Orang yang dinyatakan pailit disebut dengan *muflis*, dimana hutangnya lebih besar dari hartanya. Dalam sebuah hadist, Nabi Saw suatu ketika menggambarkan seorang yang muflis di akhirat, yaitu seseorang yang dosanya ternyata lebih besar daripada pahalanya. Orang yang mengalami pailit, karena

¹ Sunarmi, **Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)**, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 10.

pahalanya dipindahkan kepada orang yang digunjingnya, sehingga timbangan dari dosanya menjadi lebih besar daripada pahalanya.

At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata *al-falsi* jamaknya *fulus*. *Al-fals* merupakan jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang dibuat dari tembaga. *Fulus* biasanya diibaratkan dengan harta seseorang yang paling buruk juga mata uang yang paling kecil.² Orang miskin biasanya memiliki mata uang ini.

Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor demi kepentingan kreditor secara bersama-sama. Menurut Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitor). *Faillissement* ialah suatu usaha bersama guna memperoleh pembayaran bagi semua orang secara adil.³

Pengertian Kepailitan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai “sita umum atas semua harta kekayaan debitor”. Sebelumnya dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998, pengertian kepailitan berkaitan dengan syarat-syarat kepailitan dan tidak ada pengertian yang bersifat defisional. Jadi kepailitan merupakan eksekusi yang ditetapkan dari keputusan oleh hakim, yang berlaku serta-merta.

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, **Syarah Bulughul Maram**, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 504.

³ Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 11.

Dengan dinyatakan pailit demi hukum seorang Debitor kehilangan hak untuk melaksanakan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) dan hak untuk mengurus (*daden van behooren*) kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Terhitung dari tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan dapat melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan dari debitor pailit, yang selanjutnya akan dilaksanakan pengurusan oleh Kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Dari penjelasan singkat tersebut tentunya dapat diketahui bahwa tujuan kepailitan pada dasarnya adalah untuk menghindari apabila terjadi sitaan terpisah atau bisa disebut dengan eksekusi terpisah oleh kreditor, dan mengubahnya dengan melaksanakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan hak masing-masing yang dimiliki.

Kepailitan saat ini menjadi solusi penyelesaian sengketa utang piutang yang banyak diminati dikarenakan dirasa lebih cepat dan mengakibatkan hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan dalam hal kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam perkara kepailitan dikenal dengan adanya sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan dari debitor. Pengaturan sita jaminan dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar

Modal, atau Menteri Keuangan dapat, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) Pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ada 3 hal yang harus diperhatikan hakim untuk memberikan perlindungan hukum kreditor dengan menggunakan lembaga sita jaminan dalam kepailitan yaitu: 1) permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila masalah tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor; 2) hal tersebut merupakan upaya pengamanan yaitu sebagai upaya yang bersifat preventif dan sementara dan mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan

⁴ Pasal 10 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terhadap harta kekayaannya yang akan mengakibatkan kerugian kepentingan kreditor dalam pelunasan utangnya; 3) apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat memberikan syarat agar kreditor selaku pemohon memberikan jaminan berupa sejumlah uang yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Dalam prakteknya, pemohon pailit terkadang memang memohon ke Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit guna diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan itu tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Permohonan sita jaminan dalam proses kepailitan ialah sebelum putusan pailit dijatuhkan. Ratio legis dari norma ini supaya dalam proses kepailitan sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, harta yang dimiliki oleh debitor pailit tidak dapat dialihkan atau ditransaksikan, sehingga kemungkinan apabila dialihkan atau ditransaksikan dapat merugikan pihak kreditor nantinya.

Sedangkan pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketidakjelasan mengenai ukuran menentukan perlindungan hukum bagi kreditor yang digunakan sebagai acuan dikabulkan atau ditolakny sita jaminan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (3) yaitu terdapat pula ketidakjelasan mengenai penetapan Pengadilan mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan yang dirasa wajar oleh Pengadilan, sebagaimana diketahui bahwa kreditor memohonkan sita jaminan guna mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk itu penulis mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI NORMATIF PASAL 10 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ukuran menentukan perlindungan hukum bagi kreditor yang digunakan sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan?
2. Bagaimana makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan terkait perlindungan hukum bagi kreditor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis ukuran menentukan perlindungan hukum bagi kreditor yang digunakan sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan terkait perlindungan hukum bagi kreditor.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya mengenai sita jaminan sebagai perlindungan hukum kreditor.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademisi, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang memberikan manfaat terkait dengan perkembangan di bidang hukum kepailitan serta menambah wawasan mengenai sita jaminan sebagai perlindungan hukum kreditor.
- b. Bagi pemerintah, manfaat penulisan bagi pemerintah yaitu mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dalam membentuk suatu perundang-undangan yang terkait dengan sita jaminan yang pada akhirnya bisa melengkapi kompilasi peraturan terkait sita jaminan sebagai perlindungan hukum kreditor.
- c. Bagi masyarakat, melalui penulisan ini penulis mengharapkan agar masyarakat dapat memiliki peningkatan kualitas dalam memahami atau mengerti segala sesuatu tentang sita jaminan sebagai perlindungan hukum kreditor pada umumnya dan pada akhirnya memiliki wawasan tentang yang dibutuhkan ketika nantinya mereka terlibat dalam perkara kepailitan.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Peneliti	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Wisnu Ardytia (Universitas Diponegoro)	Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali REG. NO. 07 PK/N/2004)	1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor? 2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?	1. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut memfokuska n pada studi kasus terhadap peninjauan kembali REG.NO.07 PK/N/2004

2.	2013	Marisa Ramadhani Puspitasari (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Perlindungan Hukum Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitor yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	1. Bagaimana perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?	1. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum kreditor selaku pemegang jaminan fidusia
----	------	--	--	--	---

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk membahas dan mengangkat judul penulisan skripsi mengenai Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Pada bab I ini meliputi juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Kajian Umum Kepailitan
- b. Kajian Umum Sita Jaminan

c. Perlindungan Hukum

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penelitian diuraikan tentang jenis penelitian, jenis pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian
- b. Jenis Pendekatan
- c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- e. Teknik Analisis Bahan Hukum
- f. Definisi Konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan hasil pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Kepailitan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan diartikan sebagai sitaan umum, terhadap seluruh harta kekayaan dari pihak yang berhutang, untuk selanjutnya dijual di muka umum, yang diperuntukkan sebagai pembayaran hutangnya kepada seluruh kreditor, dan akan dibayarkan sesuai perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris kata pailit bisa ditemukan. Sedangkan dalam bahasa Perancis, kata *faillite* merupakan suatu pemogokan atau kemacetan di dalam melakukan suatu pembayaran. Seseorang yang mogok atau berhenti untuk melakukan pembayaran utangnya disebut dengan *Le Faille*. Dalam bahasa Belanda dipergunakan kata *faillit* yang memiliki arti ganda yaitu sebagai kata benda dan juga sebagai kata sifat, dan di dalam bahasa Inggris digunakan kata *to fail*..⁵

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta dari pihak debitor agar tercapainya

⁵ Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 26-27.

perdamaian antara debitor dan juga para kreditor atau supaya harta tersebut bisa dibagikan secara adil diantara seluruh kreditor.⁶

Munir Fuady menyamakan istilah kepailitan dengan istilah bangkrut yakni manakala perusahaan atau perseorangan tersebut tidak mampu atau tidak mau membayar hutangnya. Oleh karenanya, daripada pihak kreditor mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor untuk melunasi hutangnya tersebut, hukum memandang perlu untuk mengaturnya sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Sehingga yang dimaksud dengan kepailitan yakni sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus yang berwenang dengan permohonan khusus terhadap seluruh harta kekayaan debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang memiliki lebih dari 1 hutang atau lebih dari 1 kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti untuk membayar hutangnya, sehingga pihak debitor dapat segera untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11.

⁷ Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75.

Berdasarkan pengertian yang ada pada undang-undang kepailitan, para ahli hukum memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian “*suatu sitaan dan eksekusi terhadap seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditornya*”.⁸ Kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas:

- a. Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitor yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, debitor yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Asas keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan untuk para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Asas integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.⁹

2. Subjek Hukum Kepailitan

a. Debitor Pailit

⁸ Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

⁹ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, hlm.16.

1) Orang perorangan

yaitu siapa saja atau setiap orang yang menjalankan sebuah perusahaan atau tidak menjalankan sebuah perusahaan, orang perorangan yang dimaksud bisa laki-laki ataupun perempuan.

2) Badan hukum

Di samping manusia, badan hukum juga dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum semerta-merta beralih kepada kurator.

3) Perkumpulan tidak berbadan hukum

Perkumpulan tidak berbadan hukum adalah seperti persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Perkumpulan ini mempunyai ciri-ciri seperti: tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu; dan di samping harta kekayaan perkumpulan, maka harta privennya juga dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutangnya.

4) Harta peninggalan atau warisan

Harta warisan dari orang lain yang telah meninggal dapat dinyatakan pailit dikarenakan orang yang meninggal tersebut selama hidupnya berhenti membayar utangnya atau harta warisannya pada saat meninggal, si pewaris tidak sanggup

untuk membayar utangnya atau semasa hidupnya tidak dibayar lunas. Pernyataan pailit dari harta peninggalan yang berakibat demi hukum dapat dipisahkan dengan harta kekayaan pihak yang meninggal dengan harta kekayaan si ahli waris.

5) Penjamin atau kurator

Seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar utang debitor terhadap kreditor manakala si debitor lalai dalam kewajibannya atau cidera janji.

b. Pemohon Pailit

1) Debitor

Debitor yaitu orang atau pihak lain yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditor. Pasal 1 ayat (3) UUK dan PKPU mendefinisikan debitor sebagai orang yang memiliki utang dikarenakan perjanjian atau undang-undang yang pelunasan hutangnya dapat ditagih dimuka pengadilan.

2) Kreditor

Kreditor yaitu orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

3) Kejaksaan

Permohonan pernyataan pailit bisa diajukan oleh kejaksaan yang mengandung unsur alasan 'kepentingan umum', selain itu juga harus memenuhi unsur:

- i. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor yang memiliki utang dan telah jatuh tempo dan bisa ditagih
- ii. Tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit

4) Bank Indonesia

Dalam hal debitor adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Bank sebagai kreditor dalam menghadapi debitor non bank adalah mandiri dalam menjalankan hak nya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi apabila bank sebagai kreditor menghadapi debitor yang merupakan bank juga, maka hak untuk mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit itu hilang karena ketentuan UUK dan PKPU tersebut.

5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam adalah satu-satunya yang bisa mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit apabila debitornya merupakan perusahaan efek. Dalam hal ini debitor merupakan perusahaan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjamin, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

6) Menteri Keuangan

Selain kejaksaan, pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum juga dapat diajukan oleh

Menteri Keuangan apabila perusahaan asuransi tersebut telah dicabut izin usahanya. Dalam hak debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan dana pensiun ataupun BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan.

3. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat mengenai permohonan pailit sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapatlah dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Syarat terdapat dua kreditor atau lebih (*concurcus creditorium*)

Berdasarkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang bisa mengajukan permohonan pailit adalah seorang debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan utang

tersebut bisa ditagih, dinyatakan pailit oleh Pengadilan baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, kemudian permohonan tersebut bisa juga diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum.

Apabila debitor merupakan bank, maka pernyataan permohonan pailit hanya bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya merupakan Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di dalam bidang kepentingan publik, maka permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitor, maka tingkatan kreditor dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memiliki hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersamaan mendapatkan pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasar

pada besarnya piutang dari masing-masing kreditor dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan, terhadap seluruh kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditor Preferen

Kreditor yang oleh Undang-Undang, karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu hak yang oleh Undang-Undang diberikan pada seorang yang berpiutang yang mengakibatkan tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang yang lain, semata-mata berdasarkan dari sifat piutangnya.¹⁰

3) Kreditor Separatis

Kreditor pemegang atas hak jaminan kebendaan in rem, yang di dalam KUHPerdara disebut dengan istilah gadai dan hipotek. Pada saat ini sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam jaminan antara lain Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia¹¹

¹⁰ Kartini Muljadi, **Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan**, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004", Jakarta, Pusat pengkajian Hukum, 2005, hlm. 164-165

¹¹ *Ibid.*, hlm. 168

b. Syarat harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon pernyataan pailit yakni harus terdapat utang. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang.

Di bawah ini beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian dari utang, yaitu:

1) Menurut Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yaitu tidak semestinya hanya diberikan pengertian berupa kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, akan tetapi merupakan setiap kewajiban yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak kreditor karena kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak kreditor dan baik kewajiban itu timbul karena perjanjian tidak terbatas maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹²

2) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang

¹² Prof. Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan: Memahami *Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998***, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002., hlm. 110.

harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam saja.¹³

- c. Syarat cukup utang yang telah jatuh tempo dan bisa untuk ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan bisa ditagih memperlihatkan bahwa kreditor sudah memiliki hak menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini memperlihatkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan Haftung). Dengan demikian, jelas yaitu utang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh tempo, hal ini tidak melahirkan hak pada kreditor untuk dapat menagih utang tersebut. Dengan demikian walaupun debitor mempunyai kewajiban yaitu melunasi utang tersebut, kreditor tidak mempunyai alasan hak untuk menuntut melakukan pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian maka kreditor tidak berhak

¹³ Kartini, Gunawan, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm. 11.

memohonkan pernyataan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.¹⁴

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

a. Akibat hukum bagi debitor pailit beserta hartanya

Kepailitan hanya tentang harta kekayaan dan tidak pada perorangan debitor, debitor masih tetap bisa untuk melaksanakan hukum kekayaan yang lain seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orangtua. Oleh karena itu debitor tidak kehilangan hak untuk melaksanakan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali perbuatan itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta benda yang telah ada. Debitor yang melaksanakan perbuatan hukum terkait harta benda yang akan diperolehnya akan menjadi bagian dari harta pailit. Oleh karena itu, hak-hak debitor untuk melaksanakan semua tindakan hukum berkenaan dengan harta kekayaannya dengan memperhatikan hak kontraktual serta kewajiban debitor sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan harus dihormati sebelum terdapat pernyataan pailit.

Akan tetapi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 semenjak pengadilan telah mengucapkan putusan pernyataan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum, debitor demi hukum akan kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk di dalam harta

¹⁴ Jono, S.H, **Hukum Kepailitan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 12

pailit, sejak dari tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵ Hak maupun kewajiban si pailit beralih pada kurator untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedelnnya.¹⁶ Meskipun begitu si pailit tetap mempunyai hak untuk melakukan tindakan terhadap harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu bisa memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnnya. Meskipun jelas ditegaskan bahwa sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka seluruh harta kekayaannya akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor, terkecuali seperti:

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang didapatkan oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

¹⁵ Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 45.

¹⁶ Ahmad Yani & Wijaya Gunawan, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 85.

- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.¹⁷

Sita jaminan terhadap benda milik tergugat atau debitor biasa disebut dengan istilah sita conservatoir. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 Rbg menentukan bahwa sita conservatoir hanya bisa dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Niaga/Negeri karena adanya permintaan dari kreditor atau penggugat.¹⁸

b. Akibat hukum bagi kreditor

Pada hakikatnya, kedudukan pihak kreditor sama sehingga mereka mempunyai hak yang sama terhadap hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besar dari tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yaitu untuk golongan kreditor yang memenangkan hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang hak-haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang.

Pailitnya pihak debitor menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan oleh Undang-Undang. Akibat yuridis tersebut berlaku pada debitor yang 2 model pemberlakuan, ialah:

¹⁷ Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Nasir Muhammad, **Hukum Acara Perdata**, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 93

1) Berlaku demi hukum

Akibat yuridis yakni yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan ataupun saat pernyataan pailit telah berkekuatan hukum tetap atau setelah berakhirnya kepailitan.

2) Berlaku secara *Rule Of Reason*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat pula akibat hukum tertentu dari kepailitan yaitu yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksud dari pemberlakuannya model ini adalah bahwa akibat hukum ini tidak otomatis berlaku, akan tetapi berlaku apabila diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar untuk diberlakukan.

Jadi akibat hukum setelah terdapat pernyataan pailit ialah debitor kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan, sitaan berakhir dan diangkat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan, PKPU tidak berlaku bagi kreditor yang didahulukan.

5. Pengurusan Harta Pailit

Kurator (pengampu) ialah seorang ataupun suatu badan yang diberikan tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan dari seorang atau badan hukum yakni yang berada di bawah pengampuannya.

Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang ataupun badan hukum yang dinyatakan pailit, untuk mengurus hak dan kewajiban dari si pailit. Sehingga kurator mempunyai hak dan kewajiban juga.

Istilah kurator bukan hanya digunakan dalam kepailitan saja, akan tetapi dapat kita jumpai pada hal lain seperti dalam hal seseorang dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros, untuk melakukan hak maupun kewajiban diangkatlah seorang kurator, sedangkan ia dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang kurator adalah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan di dalam rangka melakukan pengurusan dan atau membereskan harta pailit, dan
- b. Sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Kurator yaitu sesuai terhadap tugas maupun wewenangnya di dalam pengurusan harta kekayaan pailit ialah sebagai pelindung dari kepentingan kedua pihak, yaitu:

- a. Melindungi pihak debitor dan
- b. Melindungi kepentingan para kreditor¹⁹

¹⁹ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 9-12

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kurator selalu guna kepentingan para kreditor karena bila kurator telah mengambil keputusan guna kepentingan kreditor dengan sendirinya dalam keputusan itu telah termasuk dalam kepentingan debitor.

Dapat kita lihat bahwa kurator mempunyai dua fungsi, ialah: sebagai wakil dari pihak kreditor maupun sebagai wakil dari pihak debitor, tetapi bila kepentingan antara pihak kreditor maupun pihak debitor tersebut bertentangan, maka kurator harus lebih mengutamakan kepentingan kreditor²⁰

6. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan pada hakikatnya bisa berakhir, ada beberapa cara berakhirnya kepailitan:

- a. Setelah adanya perdamaian (akkoord) yang sudah dihomologasi dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana kita bisa ketahui bahwa bila dalam kepailitan diajukan rencana untuk melakukan perdamaian, maka apabila nantinya upaya perdamaian tersebut dapat disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk pihak kreditor yang setuju dengan perdamaian tersebut, pihak kreditor yang tidak setuju dengan perdamaian tersebut maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, telah ada kesepakatan

²⁰ Suherman, *E. Faillissement (Kepailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 32

antara para pihak mengenai cara penyelesaian utang. Tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila Pengadilan menolak pengesahan upaya perdamaian karena alasan yang disebutkan di dalam Undang-Undang maka para pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Setelah putusan dari perdamaian tersebut diterima dan berkekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu untuk dilanjutkan lagi.

b. Insolvensi dan pembagian Kepailitan bisa berakhir secepatnya setelah dibayar penuh dari jumlah piutang-piutang kepada para kreditor atau melihat dari daftar pembagian penutup sehingga memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi apabila ternyata setelah berakhirnya pembagian masih terdapat harta kekayaan dari pihak debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga kurator memiliki kewenangan untuk membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar pembagian yang sudah pernah dibuat terlebih dahulu.

c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup. Sedangkan apabila ternyata harta kekayaan pihak debitor tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator bisa mengusulkan supaya kepailitan ini dicabut kembali. Keputusan untuk melakukan pencabutan kepailitan

ini dibuat berupa ketetapan hakim dan akan diputuskan di dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- d. Pencabutan atas anjuran dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga terhadap anjuran dari Hakim Pengawas bias mencabut kepailitan yaitu dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakhiran dari kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya untuk kepailitan dan imbalan jasa untuk kurator yang telah dibebankan terhadap pihak debitor. Terhadap penetapan biaya maupun imbalan jasa tersebut, tidak bisa diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan *Flat Eksekusi*.
- e. Putusan pailit dapat dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta-merta. Oleh karena itu, sejak saat putusan pailit dinyatakan maka status debitor sudah berubah dalam keadaan pailit. Namun putusan pailit bisa diajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya hukum banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

”Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”²¹

Namun dari segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang adanya putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit maka selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan putusan tersebut di dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

B. Kajian Umum Sita Jaminan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan

Sita atau penyitaan (beslag) mengandung pengertian tindakan menempatkan suatu harta kekayaan pihak tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah dari Pengadilan atau Hakim. Penetapan maupun penjagaan barang yang disita akan berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang akan menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.²²

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan untuk menjamin bisa

²¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 282.

dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita demi kepentingan penggugat dibekukan, disimpan untuk jaminan sehingga tidak boleh dialihkan atau dijual, sebab dikhawatirkan ada kemungkinan pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya pada orang lain sehingga apabila kemudia gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan maka putusan pengadilan tersebut tidak bisa dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak memiliki harta kekayaan lagi.²³

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang yang disita merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum. Sita jaminan atau yang biasa disebut dengan istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang bisa dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak rusak, dihilangkan atau dipindahtangankan sebelum perkara berakhir.²⁴

2. Macam-Macam Sita Jaminan

Ada dua macam sita jaminan, ialah sebagai berikut:

a. Sita jaminan pada barang miliknya sendiri

Pernyataan ini dilalukan terhadap barang milik kreditor (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukan digunakan untuk menjamin satu tagihan yaitu berupa uang,

²³ Sudikno Mertikusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 83.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2000, hlm. 57.

melainkan untuk dapat menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditor berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sta jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam:

1) Sita Revindicatoir

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang ini tinggal, agar barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir. Yang bisa dilakukan sita secara revindicatoir adalah barang bergerak milik pemohon, sedangkan barang tetap tidak dapat disita secara revindicatoir, oleh karena kemungkinan dapat dialihkan atau diasingkannya barang tetap itu pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.²⁵

2) Sita Maritaal

Sita maritaal bukan untuk menjamin suatu tagihan uang ataupun penyerahan barang, melainkan menjamin supaya barang yang disita tersebut tidak dijual. Jadi fungsinya ialah guna melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung yaitu antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpankan ataupun membekukan barang-barang yang disita, supaya jangan sampai jatuh di

²⁵ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara**, hlm. 211

tangan pihak ketiga. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan, maka sita maritaal tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu sendiri diperlukan guna memperoleh title eksekutorial yang mengubah dari sita jaminan menjadi title eksekutorial, sehingga putusan bisa dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

b. Sita jaminan terhadap barang milik debitor

Penyitaan ini adalah yang biasa disebut dengan sita conservatoir, yaitu merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna menjamin bisa dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan ataupun menjual barang debitor yang disita untuk memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti itu dibekukan dan tidak bisa untuk dialihkan atau dijual, tidak jarang terjadi bahwa sita conservatoir ini kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitor memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah terdapat dugaan yang beralasan, yaitu seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim ataupun selama putusan belum dijalankan mencari akal guna menggelapkan atau melarikan

barangnya. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat yaitu terdapat kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barang tersebut, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan. Syarat adanya dugaan ini bukan hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi merupakan usaha untuk mencegah penyalahgunaan supaya tidak diadakan penyitaan secara semena-mena, yang akhirnya merupakan tindakan yang sia-sia saja dan sama sekali tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Di dalam praktik peradilan wewenang hakim untuk memeriksa debitor atau tersita dapat dikatakan tidak pernah digunakan.

Mengingat fungsinya digunakan sebagai menjamin hak, maka permohonan sita jaminan selalu berkaitan dengan pokok perkara. Menurut pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri ini lah yang akan memerintahkan penyitaan tersebut. Sebagai suatu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan di tingkat banding, surat penetapan penyitaan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara yang bersangkutan. Jika Pengadilan Tinggi menguatkan puitusan Pengadilan Negeri yang isinya mengabulkan gugatan, maka di dalam dictum putusan Pengadilan Tinggi ditambahkan bahwa permohonan sita jaminan yang telah

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan sah dan berharga, sedang apabila Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di dalam putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat.

Permohonan pencabutan atau pengangkatan atas sita jaminan dari debitor dapat dikabulkan oleh hakim apabila debitor menyediakan tanggungan yang mencukupi. Demikian juga bila ternyata sita jaminan itu tidak memiliki manfaat atau barang yang telah disita tersebut ternyata bukan milik debitor. Barang yang dapat disita secara conservatoir adalah:

- 1) Barang bergerak milik debitor
- 2) Barang tetap milik debitor
- 3) Barang bergerak milik debitor yang ada ditangan orang lain.²⁶

3. Tujuan Sita Jaminan

Sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi atau menjamin agar putusan Hakim sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak hampanya putusan Hakim karena barang yang disengketakan telah tiada, rusak atau dipindah tangankan pada pihak ketiga.

Supaya hak-hak penggugat dari tergugat atas barang-barang yang dijatuhi sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah

²⁶ Adi Andoyo Soetjipto, *Conservatoir Beslag dan Berbagai Masalahnya*, 1974, hlm. 2.

satu pihak yang bersengketa. Dalam keterangan yang lain disebutkan tujuan sita jaminan sebagai berikut:

a. Agar gugatan tidak *ilusoir*

Tujuan penyitaan agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara melalui jual beli ataupun melalui penghibahan, juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa ataupun diagunkan pada pihak ketiga.

Menjaga keutuhan dan keberadaan terkait harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara suka rela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut. Dapat dilihat tujuan utama penyitaan agar gugatan penggugat tidak *ilusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.

b. Obyek eksekusi sudah pasti

Pada saat ketika permohonan sita jaminan diajukan, penggugat harus dapat menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang akan disita. Menjelaskan letak, jenis maupun

ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan tersebut pengadilan melalui juru sita memeriksa dan juga meneliti kebenaran terhadap identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas obyek eksekusi, apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemenangan penggugat akan secara langsung dijamin dengan pasti oleh barang sitaan tersebut.

Kepastian obyek eksekusi terhadap barang sitaan akan lebih sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung, apabila putusan yang telah memiliki kekuatan hukum sehingga maka barang yang disita demi hukum akan langsung menjadi sita eksekusi.

Barang yang disita bisa langsung diserahkan kepada penggugat, jika perkara yang terjadi sengketa hak milik atau barang yang disita bisa langsung dieksekusi yaitu melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang-piutang ataupun tuntutan ganti rugi.²⁷

C. Perlindungan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya

²⁷ Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 285-287.

penderitaan.²⁸ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁹

Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum dapat melindungi kepentingan seseorang yaitu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan terhadapnya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian atas kekuasaan ini dilakukan secara terukur yang artinya ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan seperti itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.”³⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena dari penguasa yang tindakannya tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan juga ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut pendapat CST Kansil, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan yakni di dalam hal ini yaitu perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan tersebut yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dan interaksinya terhadap sesama manusia

²⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79.

²⁹ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 85.

³⁰ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

beserta lingkungannya. Sebagai pemangku hak dan kewajiban manusia dalam hal ini perlu melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum yaitu dimana hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.³¹

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dipaksakan dengan tegas pelaksanaannya dengan berakibat pada suatu sanksi. Sementara itu, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua³², yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah maupun meminimalisir pelanggaran juga memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yakni berupa sanksi seperti denda, penjara ataupun hukuman tambahan yang diberikan bila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

³¹ CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 25.d

³² Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2-3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian atau riset menurut Soetandyo Wignyosoebroto,³³ bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah. Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam bidang keilmuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan pernyataan.³⁴

Di dalam suatu penelitian, metode merupakan faktor yang sangat berpengaruh di dalam proses penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Pengertian metode itu sendiri merupakan cara yang digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.³⁵

Oleh karena itu, dalam suatu penelitian harus menggunakan metode agar penelitian tersebut dapat dilakukan secara terstruktur, terarah dan tepat pada sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada skripsi ini ialah penelitian hukum (*legal research*).

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sudah sesuai norma hukum dan adakah norma yang

³³ Soetandyo Wignyosoebroto, **Hukum Paradigma, Metode dan Masalah**, Elsa dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 78.

³⁴ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007, hlm. 6.

³⁵ Moh. Nasir, **Metodologi Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 42.

berupa perintah maupun larangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁶

Hal ini dipergunakan sebagai usaha mendekatkan permasalahan yang dikemukakan dengan sifat hukum normatif. Dengan metode ini peneliti mengadakan analisis secara yuridis Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang beserta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang saat ini sedang peneliti tangani. Bagi penelitian untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk peneliti guna mempelajari ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya dan antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 47.

atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁷

Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah, harus menggunakan suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.³⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya, diantaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer serta memperkuat *Legal Issue* yang terdapat dalam hukum primer, yaitu:

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

³⁸ *Ibid*, hlm. 177.

- 1) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Artikel dan Jurnal tentang hukum baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berupa Undang-Undang beserta penjelasannya, peraturan-peraturan lain yang terkait, buku-buku literatur, dan beberapa kamus diperoleh peneliti dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Pada penelitian hukum, pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud ialah dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.⁴⁰

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer dan sekunder.

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih Pasal-pasal dalam beberapa macam peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 251-252.

2. Mengolah data dari kedua bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Bahan hukum yang telah direduksi tersebut dikaji menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dibandingkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi gramatikal

Adalah salah satu teknik analisis dengan cara yaitu menafsirkan kata-kata di dalam Undang-Undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.⁴¹

- b. Interpretasi teleologis

Adalah salah satu teknik analisis dengan cara menelaah tujuan adanya Undang-Undang ini, juga pemikiran yang melandasi adanya Undang-Undang serta penjelasan rasional untuk apa Undang-Undang dibuat.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah: sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakin Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

⁴¹ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165

Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Sita Jaminan adalah: tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.
3. Perlindungan Hukum adalah: dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
4. Kreditor adalah: pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

1. Sejarah Berlakunya Kepailitan di Indonesia

Dalam sejarah berlakunya kepailitan yang ada di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut:

a. Masa sebelum Failisements Verordening berlaku

Sebelum Failisemenets Verordening berlaku, terlebih dulu hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu sebagai berikut:

- 1) Wet Book Koophandel atau Onvormogen Van Kooplieden yaitu peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini merupakan peraturan kepailitan untuk pedagang.
- 2) Reglement op de Rechtvoordering (RV) Stb 1847-52 jo 1849-63, dalam buku ketiga bab ketujuh dengan judul Van de staat van kenneljk onvermogenatau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini merupakan Peraturan kepailitan bagi orang-orang yang bukan

pedagang. Akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya, kedua aturan ini justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- 1) Banyaknya formalitas yang mengakibatkan sulit dalam pelaksanaannya
- 2) Biaya tinggi
- 3) Pengaruh kreditor yang terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- 4) Perlu waktu yang cukup lama

Oleh karena itu, dibuatlah aturan baru yang cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan Kepailitan tersebut.

b. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening*

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur di dalam *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348). Peraturan ini sebenarnya hanya dapat berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing.

Bagi golongan Indonesia Asli (pribumi) bisa saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini melalui cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 yang berlaku untuk semua orang yaitu diperuntukkan bagi pedagang maupun yang

bukan pedagang, dan baik perseorangan maupun badan hukum. Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini merupakan sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dilihat melalui asas konkordansi (Pasal 31 IS), yaitu dimulai dengan berlakunya *Code du Commerce* (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 yang diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada akhirnya setelah berlakunya *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348), Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan terkait kepailitan, yaitu sudah ada 3 peraturan perundangan merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴²

⁴² Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 9-12.

2. Hal yang Melatarbelakangi Perlunya Sita Jaminan

Pada dasarnya dalam membina hubungan antar masyarakat sering terjadi gesekan kepentingan yang dapat menjadi sebuah sengketa hukum. Bahwa terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan solusi yang mereka terima, sehingga selanjutnya mengajukan sengketanya ke pengadilan.

Para pihak yang telah mengajukan tuntutan hak ke pengadilan pasti akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku yakni dimulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan oleh pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya berharap putusan dimana semata yang berisi penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dimana didalamnya ditentukan secara pasti hak maupun hubungan hukum dari para pihak dengan objek yang dipersengketakan. Namun sudah pasti putusan tersebut bisa dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang biasa disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.⁴³

Hal ini bisa diartikan bahwa suatu putusan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun putusan

⁴³ M.Harsono, **Skripsi Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan Menurut Rbg**, universitas sumatera utara, Medan, 2010., hlm. 1-4

pengadilan tersebut dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, akan tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung termohon akan menjual barang-barangnya ataupun dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan hendak dieksekusi karena barang tersebut berada ditangan tergugat yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak pemohon.⁴⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di dalam hukum acara perdata telah diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan yang diatur dalam Pasal 261 Rbg dan 227 ayat (1) HIR.

Pasal 261 Rbg menjelaskan sebagai berikut:

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitor yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditor, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitor bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitor dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”⁴⁵

Pasal 227 ayat (1) HIR menjelaskan sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau

⁴⁴ Muhammad Abdul Kadir, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 173.

⁴⁵ Pasal 261 Rbg

selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”⁴⁶

Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas bahwa sita jaminan merupakan suatu upaya hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor. Sehingga sudah sewajarnya apabila kreditor memohonkan untuk dikabulkannya sita jaminan oleh Ketua Hakim Pengadilan dalam perkara Kepailitan. Akan tetapi, Ketua Hakim Pengadilan tentu memiliki alasan dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan dengan melihat beberapa faktor yang dirasa mendukung dalam perkara Kepailitan tersebut.

Dalam perkara kepailitan, perlulah diperhatikan bahwa hukum harus mengupayakan untuk mengatasi keengganan para debitor untuk memenuhi kewajibannya, dengan cara menentukan tingkatan kreditor serta prioritas pembayaran terhadap piutang-piutangnya, dengan cara mengadakan tindakan-tindakan untuk mencegah para debitor menyingkirkan harta kekayaannya serta dengan mengadakan pengaturan tentang pemberesan terhadap harta kekayaan ataupun sampai rehabilitasi debitor. Oleh karena itu, didalamnya juga harus

⁴⁶ Pasal 227 ayat (1) HIR

terdapat suatu jaminan agar debitor diperlakukan secara tidak semena-mena.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, dalam hukum kepailitan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya berisi diperkenankannya mengajukan permohonan sita jaminan oleh Kreditor ataupun menunjuk kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah dalam kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap harta kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utang-utangnya.

Peraturan Kepailitan yang lama menyebutkan bahwa hanya terdapat satu kurator dalam kepailitan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP). Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1988, BHP tidak lagi berperan sebagai lembaga yang mengurus dan membereskan harta pailit. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa yang menjadi kurator dalam Kepailitan yaitu: (1) Balai Harta Peninggalan; atau (2) Kurator lainnya. Adanya dua kurator dalam kepailitan ini tetap dipertahankan dengan keluarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Kurator mempunyai sejumlah kewajiban antara lain:⁴⁷

- a. Kurator dalam pengurusan dan harta pailit.
- b. Kurator wajib mengumumkan putusan atau membatalkan putusan pailit dalam berita Negara RI dan dua surat kabar harian.
- c. Kurator wajib menyelamatkan harta pailit.
- d. Menyusun inventaris harta pailit.
- e. Menyusun daftar ulang dan piutang harta pailit.
- f. Melanjutkan usaha debitor.
- g. Berwenang membuka surat yang ditunjuk pada yang pailit.
- h. Menerima pengaduan mengenai si pailit.
- i. Berwenang member nafkah bagi yang pailit atas izin hukum pengawas.
- j. Memindah tangankan harta pailit.
- k. Menyimpat harta pailit.
- l. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit.
- m. Memberikan pernyataan pendapat tertulis tentang rencana melalui perdamaian dalam rapat.
- n. Megumumkan perdamaian.
- o. Membungkakan uang tunai.
- p. Dapat melakukan pinjaman dari pidak ketiga.

⁴⁷ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 144

- q. Memberikan pertanggung jawaban kepada debitor saat di hadapan hakim pengawas.
- r. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik.
- s. Kurator harus menyampaikan laporan bersifat terbuka untuk umum mengenai keadaan dari harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan.

Kewajiban kurator tersebut sejalan dengan pendapat Faisal Santiago, di mana tugas kurator dalam menjalankan perkara kepailitan setelah mendapat penetapan dari pengadilan, yakni:⁴⁸

- a. Mengambil alih hak debitor pailit dalam mengatur dan/atau melikuidasi debitor pailit dan pemberesan harta pailit.
- b. Melakukan pengawasan terhadap budel pailit dengan segala cara yang dianggap perlu dan segera mengambil alih atas seluruh dokumen-dokumen, uang, perhiasan, saham dan surat berharga lainnya.
- c. Dengan alasan untuk melindungi budel pailit, maka budel pailit dapat disegel/disita dengan persetujuan hakim pengawas.
- d. Segera melaksanakan investarisasi atas seluruh budel pailit.
- e. Dengan persetujuan dapat melanjutkan usaha debitor pailit.
- f. Bertindak untuk dan atas nama debitor pailit dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan debitor pailit, baik dari kreditor ataupun dari debitor pailit.

⁴⁸ Faisal Santiago, **Pengantar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.

- g. Mempunyai hak (dengan persetujuan hakim pengawas) untuk mendapatkan pinjaman, dalam rangka meningkatkan harta pailit.
- h. Melaporkan kondisi debitor dan budel pailit dan pelaksanaan tugas serta kewajiban sebagai kurator setiap 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) juga diatur, apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, Pengadilan Niaga dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar demi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak debitor dan pihak kreditor.

B. Pembatasan Ukuran Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang Digunakan Sebagai Acuan Dikabulkan atau Ditolaknya Sita Jaminan

1. Perlindungan Hukum Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Dijatuhkan

Pengertian kepailitan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 sebagai “sita umum atas semua harta kekayaan debitor”. Menurut Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitor). *Faillissement* adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.⁴⁹

⁴⁹ Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 11.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 maka ada 3 hal yang harus diperhatikan hakim untuk memberikan perlindungan hukum kreditor dengan menggunakan lembaga sita jaminan dalam kepailitan yaitu:

- a. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila masalah tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor;
- b. Hal tersebut merupakan upaya pengamanan yang bersifat preventif atau sementara dan mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan terhadap harta kekayaannya, sehingga bisa merugikan kepentingan dari pihak kreditor dalam rangka pelunasan utangnya;
- c. Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka pengadilan niaga dapat menetapkan syarat agar kreditor permohonan memberikan jaminan sejumlah uang yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Prinsip bahwa dalam perkara kepailitan harus dilakukan atau dilaksanakan secara adil, dalam arti yakni dengan memperhatikan kepentingan debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang telah menjadi Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.42 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 dalam perkara PT. Citra Jombaran Indah Hotel melawan S. Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut, antara lain menyebutkan bahwa penerapan kepailitan harus dilakukan dan diselesaikan secara adil dalam arti

memperhatikan kepentingan dari perusahaan sebagai debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang. Potensi maupun prospek dari usaha debitor harus ada dan diperhitungkan secara baik. Juga debitor masih mempunyai potensi maupun prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih bisa berkembang. Seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan terus berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimatum remedium*.⁵⁰ yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku dari manusia, terutama untuk penjahat, serta memberikan tekanan yang bersifat psikologis agar orang lain tidak akan melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang ini merupakan hal yang dapat memberikan kerugian terhadap orang lain dengan merampas hak dari orang lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas apabila pengertian perlindungan hukum dalam perkara kepailitan harus dilakukan secara proporsional dan teliti dengan memperhatikan kepentingan kreditor termasuk kreditor lainnya yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan dan debitor secara seimbang. Sebagaimana diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor akan kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan dari harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan dari harta benda tersebut akan beralih ke kurator (Balai Harta Peninggalan – BPH).

⁵⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tahun 2000, MARI, Jakarta, hlm. 175

Berdasarkan hal tersebut, akan menimbulkan kekhawatiran apabila debitor sebelum dijatuhkannya putusan pailit, melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor. Memperhatikan rumusan Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut, maka diatur upaya dalam pengamanan apabila debitor melakukan tindakan yang tidak semestinya yaitu menghilangkan atau mengalihkan harta kekayaannya.

Sehingga berdasarkan ketentuan sita jaminan, maka sebelum putusan pailit dijatuhkan, maka dapat dimohonkan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kreditor. Terdapat beberapa macam sita jaminan antara lain:

a. Sitas jaminan pada barang miliknya sendiri

Pernyataan ini dilakukan terhadap barang milik kreditor (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sitas jaminan ini bukan untuk menjamin satu tagihan yaitu berupa uang, melainkan untuk dapat menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditor berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sitas jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam:

1) Sitas Revindicatoir

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut

disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir. Yang bisa dilakukan sita secara revindicatoir adalah barang bergerak milik pemohon, sedangkan barang tetap tidak dapat disita secara revindicatoir, oleh karena kemungkinan dapat dialihkan atau diasingkannya barang tetap itu pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.⁵¹

2) Sita Maritaal

Sita maritaal bukan untuk menjamin suatu tagihan uang ataupun penyerahan barang, melainkan menjamin supaya barang yang disita tersebut tidak dijual. Jadi fungsinya ialah guna melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung yaitu antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpankan ataupun membekukan barang-barang yang disita, supaya jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan, maka sita maritaal tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu sendiri diperlukan guna memperoleh title eksekutorial yang mengubah dari sita jaminan menjadi title eksekutorial, sehingga putusan bisa dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara**, hlm. 211

b. Sita jaminan terhadap barang milik debitor

Penyitaan ini adalah yang biasa disebut dengan sita conservatoir, yaitu merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna menjamin bisa dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan ataupun menjual barang debitor yang disita untuk memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti itu dibekukan dan tidak bisa untuk dialihkan atau dijual, tidak jarang terjadi bahwa sita conservatoir ini kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitor memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah terdapat dugaan yang beralasan, yaitu seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim ataupun selama putusan belum dijalankan mencari akal guna menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat yaitu terdapat kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barang tersebut, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan. Syarat adanya dugaan ini bukan hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi merupakan usaha untuk mencegah penyalahgunaan supaya tidak diadakan penyitaan secara semena-mena, yang akhirnya merupakan tindakan yang

sia-sia saja dan sama sekali tidak mengenai sasaran (vexatoir). Di dalam praktik peradilan wewenang hakim untuk memeriksa debitor atau tersita dapat dikatakan tidak pernah digunakan.

Mengingat fungsinya digunakan sebagai menjamin hak, maka permohonan sita jaminan selalu berkaitan dengan pokok perkara. Menurut pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri inilah yang akan memerintahkan penyitaan tersebut. Sebagai suatu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan di tingkat banding, surat penetapan penyitaan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara yang bersangkutan. Jika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang isinya mengabulkan gugatan, maka di dalam dictum putusan Pengadilan Tinggi ditambahkan bahwa permohonan sita jaminan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan sah dan berharga, sedang apabila Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di dalam putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat.

Permohonan pencabutan atau pengangkatan atas sita jaminan dari debitor dapat dikabulkan oleh hakim apabila

debitor menyediakan tanggungan yang mencukupi. Demikian juga bila ternyata sita jaminan itu tidak memiliki manfaat atau barang yang telah disita tersebut ternyata bukan milik debitor.

Tabel 1.1 Perbedaan Macam Sita Jaminan

Sita jaminan pada barang miliknya sendiri	Sita jaminan terhadap barang milik debitor
<p>1. Sita Revindicatoir</p> <p>Tujuan : mendapatkan hak pemohon kembali</p> <p>Objek : hanya terbatas barang bergerak milik pemohon</p> <p>2. Sita Maritaal</p> <p>Tujuan : melindungi hak pemohon</p> <p>Objek : harta bersama yang dikuasai oleh para pihak</p>	<p>1. Sita Conservatoir</p> <p>Tujuan : menjamin atau menjaga hak pemohon</p> <p>Objek : barang bergerak milik debitor, barang tetap milik debitor, barang bergerak milik debitor yang ada ditangan orang lain</p>

Sumber: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia

Dalam perkara Kepailitan sita jaminan yang digunakan adalah Sita Conservatoir, yaitu sita yang diajukan oleh kreditor terhadap harta milik debitor sebagai jaminan pelunasan atas utangnya.

Perihal Sita Conservatoir ini, intisari dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada sangkaan yang mempunyai alasan, yakni bahwa termohon sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, yang artinya barang tersebut bukan milik pemohon;
- c. Permohonan diajukan pada ketua pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.⁵²

Sebagaimana dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan merupakan upaya perlindungan hukum sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengenai sita jaminan dalam perkara kepailitan yaitu sita conservatoir yaitu sita yang dimohonkan oleh pihak kreditor kepada

⁵² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm. 100.

pihak debitor yang berfungsi untuk melindungi hak dari kreditor bukan untuk menciptakan hak baru.

2. Batasan Ukuran Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Sebagai Acuan Dikabulkan atau Ditolaknya Sita Jaminan

Sita jaminan yang dapat dimohonkan oleh kreditor kepada Pengadilan merupakan hak dari kreditor itu sendiri. Permohonan sita jaminan dari kreditor kepada Pengadilan dapat dikabulkan apabila Hakim merasa perlu melakukan tindakan sita jaminan sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditor. Dalam hal ini, hakim sebelum memutuskan terkait pelaksanaan sita jaminan terlebih dahulu perlu memperhatikan beberapa kondisi yang dirasa harus dilakukan untuk melindungi hak dari kreditor itu sendiri. Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. Tindakan hukum eksepsional yakni berarti sita jaminan merupakan tindakan yang diambil Pengadilan mendahului putusan pengadilan atau sebelum putusan dijatuhkan/memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa seolah-olah pengadilan menghukum termohon terlebih dahulu walaupun belum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Letak sifat istimewa atau eksepsional penyitaan adalah:

a. Penyitaan memaksakan kebenaran permohonan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 226 Rbg, 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan tersebut, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal,

sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tanpa memperdulikan kebenaran dalil permohonan yang diajukan kepada termohon, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada termohon kebenaran dalil pemohon, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Inilah salah satu sifat eksepsional tindakan penyitaan. Kepada hakim diberi kewenangan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan termohon melalui sistem pemaksaan kebenaran dalil gugatan pemohon, sebelum gugatan itu sempurna diperiksa dan dinilai.

b. Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan

Sekiranya pun tindakan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung hal itu tetap diambil mendahului putusan. Seolah-olah kepada termohon dipaksakan kebenaran putusan, sebelum putusan yang bersangkutan diambil dan dijatuhkan. Meskipun demikian, oleh undang-undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagai tindakan eksepsional hakim dapat menghukum termohon berupa tindakan menempatkan harta kekayaan di bawah penjagaan, meskipun putusan tentang pernyataan pailit belum dijatuhkan, termohon telah dijatuhi hukuman yakni berupa penyitaan terhadap harta kekayaan termohon.⁵³

⁵³ M. Yahya Harahap. **Hukum Acara Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 282

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari adanya sita jaminan yaitu:

- a. Sita jaminan berfungsi untuk melindungi kreditor dari itikad buruk dari debitor sehingga permohonan pailit tidak hampa apabila nanti pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Sita jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditor terhadap kepastian atas objek eksekusi bila putusan pernyataan pailit telah berkekuatan hukum tetap.

Permohonan sita jaminan itu sendiri harus disertai dan berdasarkan alasan atau dugaan yang kuat. Permohonan sita dari Kreditor tersebut selayaknya harus disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan apabila tidak disertai dengan suatu alasan atau dugaan yang kuat. Karena itu tindakan sita jaminan tidak boleh diterapkan secara serampangan karena merupakan upaya menjamin hak-hak dari Kreditor, andaikata putusan Hakim mengatakan bahwa Debitor dinyatakan pailit maka akan lebih pasti bahwa putusnya itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Oleh karena alasan yang bersifat eksepsional itulah, maka penerapannya harus dengan:

- a. Kebijaksanaan Majelis Hakim (Pengadilan) untuk mempertimbangkan secara hati-hati dan secara teliti yang disertai dengan alasan yang dirasa kuat serta didukung pula dengan fakta-fakta yang mendasar.

- b. Kebijakan mengabulkan sita jaminan dari awal didasarkan oleh bukti yang kuat perihal akan dikabulkannya permohonan Pailit dari pihak Kreditor.
- c. Kebijakan bahwa tindakan sita jaminan merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi hak dari Kreditor, bukan menciptakan atau memberikan hak baru.

Berdasarkan uraian diatas kita ketahui bahwa batasan yang digunakan hakim dalam menentukan perlindungan hukum bagi Kreditor sebagai acuan dikabulkannya atau ditolaknya sita jaminan adalah bersifat eksepsional. Hal mana berarti jika terdapat permohonan dari Kreditor untuk mealakukan sita jaminan maka seluruhnya merupakan kewenangan dari Hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusannya dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Harus terdapat dugaan dan alasan yang kuat bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan, mengasingkan atau melarikan barangnya.
- b. Harus terdapat fakta-fakta mendasar dan bukti-bukti yang kuat antara lain:
 - (1) Mengenai sifat, letak maupun ukuran barang yang disita
 - (2) Menjelaskan surat-surat yang berkaitan dengan identitas barang

(3) Penegasan bahwa status barang tersebut merupakan barang debitor

C. Makna Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditor

1. Jaminan Dalam Hukum Perdata

Istilah jaminan adalah terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhi atas tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitor terhadap barang-barangnya.⁵⁴

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor pasti akan memenuhi kewajiban yang bisa dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Selanjutnya menurut M.Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁵⁵ Alasan digunakan istilah jaminan karena:

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.

⁵⁴ Salim. **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21

⁵⁵ Bahsan, M. **Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**. Jakarta: Rejeki Agung. 2002. hlm. 148

- b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Dari pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan mempunyai arti yaitu sebagai suatu tanggungan yang bisa dinilai dengan uang yang berupa suatu kebendaan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor dari adanya suatu perikatan atau perjanjian hutang piutang maupun perjanjian lainnya. Kebendaan tersebut dimaksudkan sebagai tanggungan dari hutang yang diberikan kreditor terhadap debitor sampai debitor dapat melunasi hutangnya. Apabila debitor wanprestasi, maka kebendaan tersebut akan dinilai dengan uang untuk selanjutnya digunakan sebagai pelunasan dari hutang debitor kepada kreditor. Dengan kata lain jaminan disini mempunyai fungsi sebagai penjamin pemenuhan hutang debitor apabila seandainya terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo atau hutangnya berakhir.

Jaminan berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Jaminan umum yang bersumber dari undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang kaidahnya berbunyi: segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatan perseorangan

(pasal 1131), dalam ketentuan Pasal 1132 ditentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut bear kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

- b. Jaminan khusus berdasarkan perjanjian, yaitu hipotek, gadai, fiducia dan penanggungan atau jaminan pribadi.⁵⁶

Lembaga jaminan umum yang bersumber dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mempunyai kelemahan yang bersifat mendasar dalam keandalannya untuk melunasi hutang debitor apabila yang bersangkutan wanprestasi. Dalam jaminan umum ini terjadi karena jaminan tersebut diletakkan pada segenap harta debitor tidak mencukup untuk melunasi hutangnya sangat besar, sehingga untuk mengantisipasi permasalahan tersebut alternatif yang digunakan adalah jaminan khusus, di mana obyeknya benda milik debitor yang telah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu pula berdasarkan perpanjangan.⁵⁷

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen, 1980, **Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, BPHN dan Liberty, Yogyakarta, hlm. 43-46

⁵⁷ Moch. Isnaeni, 1996, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, Surabaya: Dharma Muda, hlm. 33

Tabel 1.1 Perbedaan Macam Jaminan

No.	Jaminan Umum	Jaminan Khusus
1.	Jaminan yang terjadi atau timbul dari Undang-Undang	Jaminan yang terbit dari perjanjian tertentu
2.	Jaminannya pada setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitor	Jaminannya barang-barang tertentu seperti gadai, hipotel, cessie asuransi, dll

Sumber: Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia

Beberapa prinsip hukum mengenai jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan harta pihak peminjam, yakni bahwa harta pihak peminjam ialah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya.

Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa semua harta dari pihak peminjam, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari adalah jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata adalah salah satu ketentuan pokok di dalam hukum jaminan, yaitu mengatur

tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang dari pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Dalam praktik sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang akan ada di kemudian hari misalnya berupa warisan, penghasilan, gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam.

b. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Bagaimana kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPdata. Berdasarkan ketentuan 1132 KUHPdata dapat disimpulkan yakni kedudukan pihak pemberi pinjaman bisa dibedakan atas dua golongan, yaitu:

- 1) Yang mempunyai kedudukan yang berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan
- 2) Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 1132 KUHPdata menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi

pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar dan kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk dapat didahulukan.

- c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang dari pihak pemberi jaminan

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang apabila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan ini diatur oleh Pasal 1154 KUHPerdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUHPerdata tentang Hipotek. Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya nilai utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang serta-merta menjadi pemilik objek jaminan utang apabila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan diatas tentunya akan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak peminjam.⁵⁸

⁵⁸ Badruzaman Mariam Darus, **Aneka Hukum Bisnis**, CV Alumni, Bandung, 1994. hlm. 9-16

Berdasarkan penjelasan prinsip hukum mengenai jaminan tersebut maka jelas mengenai kedudukan masing-masing pihak, yaitu pihak peminjam atau debitor dan pihak pemberi pinjaman yaitu kreditor.

2. Makna Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditor

Permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh kreditor dapat ditetapkan syarat agar kreditor memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan sesuai pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Makna jaminan yang dianggap wajar sendiri yakni bahwa jaminan tersebut harus sebagaimana adanya atau sepatutnya yang harus diberikan oleh kreditor berupa sejumlah uang sesuai kemungkinan kerugian yang akan diterima oleh Debitor sebagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pihak kreditor maupun pihak debitor. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pihak debitor tidak mendapatkan kerugian apabila permohonan sita jaminan dikabulkan oleh pengadilan.

Meskipun secara teoritis kepailitan tidak mempengaruhi kedudukan si pailit di masyarakat, akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat pernyataan pailit memberikan pandangan negatif terhadap si pailit itu sendiri maupun bagi perusahaannya. Di samping

itu karena adanya sita jaminan tersebut, maka debitor tidak dapat melakukan penggunaan terhadap harta kekayaannya yang disita yang kemungkinan dapat digunakan dalam hal aktifitas perusahaan sehingga memberikan kerugian bagi pihak debitor itu sendiri.

Dalam hukum acara memperbolehkan adanya tindakan sita jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR/261 Rbg. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkan. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa:

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.”⁵⁹

Sebagaimana pada Pasal 1131, benda yang menjadi tanggungan atas segala perikatan yaitu benda bergerak dan tak bergerak, benda yang sudah ada maupun yang akan ada. Penjelasan mengenai benda bergerak dan tak bergerak selanjutnya tercantum pada Pasal 506-508 untuk benda tak bergerak dan Pasal 509-518 untuk benda bergerak. Selanjutnya penjelasan mengenai benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada tercantum dalam Pasal 1334.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor, kecuali:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan

⁵⁹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.⁶⁰

Dalam Rv memuat tentang ketentuan yang secara khusus mengatur perlawanan terhadap instrument sita jaminan, Pasal 724 dan 725 Rv memberikan kesempatan bagi pihak tersita/debitor untuk mengajukan bantahan baik dengan sidang singkat di hadapan ketua Pengadilan maupun dihadapan sidang *raad van justitie*. Perlawanan ini diajukan dalam suatu pemeriksaan atas sah dan berharga atau tidaknya sita jaminan, yang harus diadakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan. HIR/RBg sama sekali tidak mengatur tentang tuntutan ganti kerugian terhadap sita jaminan yang kemudian diangkat karena Pengadilan menolak pokok perkara. HIR/RBg juga tidak melakukan persyaratan bagi pemohon sita jaminan untuk menyerahkan jaminan sebagai syarat dikabulkannya sita jaminan, sehingga tidak terdapat suatu jaminan yang siap dieksekusi kepada tersita atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dari akibat sita tersebut.

⁶⁰ Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengaturan mekanisme ganti rugi diatur di dalam Rv, yang memberikan kesempatan bagi tersita untuk menuntut ganti rugi apabila sita jaminan tersebut kemudian diangkat. Rv mengatur bahwa kreditor/pemohon sita dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga, jika terdapat alasan untuk itu.⁶¹

Selain itu, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (3) Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan. Penetapan agar kreditor memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan ini dimaksudkan antara lain:

- a. Pengadilan dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar apabila upaya pengamanan tersebut dapat dikabulkan.
- b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua pihak yaitu kepentingan debitor dan kreditor.
- c. Dalam menetapkan persyaratan mengenai jaminan tersebut, Pengadilan antara lain sudah semestinya mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dengan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang mungkin diderita oleh debitor apabila pemohon pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

⁶¹ Pasal 732 Rv

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan terhadap kalimat perlindungan hukum bagi kreditor terkait sita jaminan dalam perkara kepailitan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah secara eksepsional, yakni bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului putusan pengadilan atau sebelum putusan dijatuhkan/memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga diketahui bahwa batasan yang digunakan hakim dalam menentukan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai acuan dikabulkannya atau ditolaknya sita jaminan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah bersifat eksepsional dengan melihat tujuan utama dari adanya sita jaminan yaitu:
 - a. Sita jaminan berfungsi untuk melindungi kreditor dari itikad buruk dari debitor sehingga permohonan pailit tidak hampa apabila nanti pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. Sita jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditor terhadap kepastian atas objek eksekusi bila putusan pernyataan pailit telah berkekuatan hukum tetap.

2. Makna jaminan yang dianggap wajar sendiri yakni bahwa jaminan tersebut harus sebagaimana adanya atau sepatutnya yang harus diberikan oleh kreditor berupa sejumlah uang sesuai kemungkinan kerugian yang akan diterima oleh Debitor sebagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pihak kreditor maupun pihak debitor. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pihak debitor tidak mendapatkan kerugian apabila permohonan sita jaminan dikabulkan oleh pengadilan. Penetapan agar kreditor memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan ini dimaksudkan antara lain:
- a. Pengadilan dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar apabila upaya pengamann tersebut dapat dikabulkan.
 - b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua pihak yaitu kepentingan debitor dan kreditor.
 - c. Dalam menetapkan persyaratan mengenai jaminan tersebut, Pengadilan antara lain sudah semestinya mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dengan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang mungkin diderita oleh debitor apabila pemohon pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

B. Saran

1. Bagi hakim, hakim dapat lebih teliti dalam menelaah dugaan atau alasan-alasan dalam mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan karena hal ini sangat berpengaruh pada putusan pernyataan pailit yang dimohonkan oleh pemohon pailit, sehingga hakim dapat melindungi hak dan dapat lebih memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara, dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun hakim lainnya.
2. Bagi pemerintah, dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum kreditor terkait sita jaminan dalam perkara kepailitan sesuai dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunddan Kewajiban Pmebayaran Utang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih banyak referensi yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor terkait sita jaminan dalam perkara kepailitan agar hasil dari penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi dan dalam menelaah kata-kata dalam hukum diharapkan lebih mendalami arti tersebut sehingga proses penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, 2006, **Syarah Bulughul Maram**, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk.
- Adi Andoyo Soetjipto, 1974, **Conservatoir Beslag dan Berbagai Masalahnya**,.
- Adrian Sutedi, 2009, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Asikin, Zainal, 1991, **Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badruzaman Mariam Darus, 1994, **Aneka Hukum Bisnis**, CV Alumni, Bandung.
- Bahsan, 2002, M. Penilaian **Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**. Jakarta: Rejeki Agung.
- CST Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta,.
- Faisal Santiago, 2012, **Pengantar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hamidi, 2007, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Jono, 2008, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, Gunawan, 2003, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Jakarta, Rajawali Press.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mukti Arto, 2005, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2002, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Moch. Isnaeni, 1996, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, Surabaya: Dharma Muda.
- Moh. Nasir, 1983, **Metodologi Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nasir Muhammad, 2005, **Hukum Acara Perdata**, Djambatan, Jakarta.
- Prof. Sutan Remy Sjahdeini, 2002, **Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998**, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Rahayu Hartini, 2008, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salim, 2014, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, **Hukum Paradigma, Metode dan Masalah**, Elsa dan Huma, Jakarta.
- Sudikno** Mertikusumo, 2002, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty.
- Suherman, 1998, **E. Faillissement (Kepailitan)**, Binacipta, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen, 1980, **Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN dan Liberty**, Yogyakarta.
- Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, 1994, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainal Asikin, 2002, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 10 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 261 Rbg

Pasal 227 ayat (1) HIR

Pasal 732 Rv

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tahun 2000, MARI, Jakarta.

Karya Tulis Ilmiah dan Makalah

Kartini Muljadi, 2005, kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004", Jakarta, Pusat pengkajian Hukum.

M.Harsono, 2010, skripsi Pelaksanakan Eksekusi Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan Menurut Rbg, universitas sumatera utara, Medan.

Sunarmi, 2004, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 1132 /UN10.1/AK/2016

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 14 Desember 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

Nama : Mohammad Hamidi Masykur, SH, M.Kn.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : Arini Ulfa Mawaddaty

NIM : 135010100111148

Program : Strata Satu (S-1)

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Malang
: 14 Desember 2016

Dekan
Dr. RACHMAD SAFA'AT, S.H., M.Si.
Fakultas Hukum
HUKUM, 196208051988021001

- Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian Hukum Perdata
 2. Dosen yang bersangkutan;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Sub Bagian Akademik SI.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Abdul Kadirman Budiono, S1, M1, M2
Pembimbing Pendamping : Muhammad Hawid Masruki, S1, M1, M2
SK Dekan : No. 1132
: Tgl. 14 Desember 2016.

APAKAH ALFA MAWADDATY
135010100111148
ANALISIS MUHASIR TERKAIT CITA SUMANAN (SABAN) PERTINDINGAN
HUKUM KREATOR DALAM PERSISI KEPERILIHAN CINTA WAWANCARA
KE-2 AGUST (2) 2 AGUST (3) UU WA-37/2004 TENTANG KEPERILIHAN
DAN PEMERIKSAAN KEMUDIAN PEMERIKSAAN ALIRAN?

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	7 April 2017	Pembi BAB iv Pembacaan	- Uraikan materi p. 261 Prg & p. 377 KUP - Penambahan fungsi barang - uraian masalah pelayanan pendidikan - tabel perbedaan sisi lain - tabel perbedaan jumlah - bagian tengah p. 191 KUPPR:	[Signature]
2	April 27 April 2017	beva bab iv Pembacaan	- bagian tengah p. 191 KUPPR:	[Signature]
3	2 Mei 2017	Pembi BAB iv Pembacaan	uraian lebih spesifik & jelas	[Signature]
4.	5 Mei 2017	Pembi BAB iv & BAB iv Pembacaan & Yekunap	- uraian jawaban yg dianggap wajar - makna jawaban yg dianggap wajar	[Signature]
5.	5 Mei 2017	Pembi BAB v	lebih fokus dengan kesimpulan	[Signature]
6.	8 Mei 2017	Pembi BAB v	Bantuan & masukan lebih fokus. 1. berikan uraian pertanggung jawaban 2. jawaban yg dianggap wajar	[Signature]
7.	9 Mei 2017	KC.	Acc	[Signature]

Mengetahui Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Fekmad Badono, SM-MH

Mohammad Hamdi Maqfur, SH. M. Km